

Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Pariwisata Sudi Wisata Pantai Lagunci Desa Bahari 3 Buton Selatan

Riyana B. Makian^{1*}, La Didi¹, Wa ode Arsyiah¹

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: riyanabunyahamin@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 20 Maret 2025

Revised: 5 April 2025

Accepted: 30 April 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci di Desa Bahari 3, Kabupaten Buton Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat lokal, pengelola wisata, dan pemerintah desa, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, serta pemanfaatan hasil pengelolaan pariwisata, terutama dalam kegiatan operasional, ekonomi, dan pelestarian budaya lokal. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih bersifat pasif dan masyarakat belum dilibatkan secara resmi dalam proses evaluasi pengelolaan pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci masih didominasi oleh pendekatan top-down dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan keterlibatan masyarakat secara aktif dan inklusif pada seluruh tahapan pengelolaan pariwisata guna mendukung keberlanjutan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal.

Kata kunci: Partisipasi; Masyarakat; Pariwisata; Wisata

Abstract

This study aims to analyze community participation in the management of Lagunci Beach tourism in Bahari 3 Village, South Buton Regency. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews with local communities, tourism managers, and village governments, then analyzed using thematic analysis. The results of the study show that the community has participated in decision-making, planning, and utilization of tourism management results, especially in operational, economic, and local cultural preservation activities. However, community participation in decision-making is still passive and the community has not been officially involved in the tourism management evaluation process. This condition shows that Lagunci Beach tourism management is still dominated by a top-down approach and has not fully implemented the principles of community-based tourism. This study recommends increasing active and inclusive community involvement at all stages of tourism management to support sustainability and equitable distribution of benefits for local communities.

Keywords: Participation; Community, Tourism; Tourism

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja. Pantai Lagunci di Desa Bahari 3, Kecamatan

Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun, potensi ini memerlukan pengelolaan yang efektif agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Dalam konteks administrasi publik, partisipasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang demokratis, responsif, dan berkelanjutan (Agus & Riska, 2023). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa sektor pariwisata, meskipun belum menjadi kontributor utama, memiliki tren peningkatan kunjungan wisatawan yang perlu dikelola secara optimal untuk memaksimalkan dampaknya terhadap ekonomi lokal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan, 2023).

Secara teoritis, partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk pariwisata, diakui sebagai prinsip penting dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Teori partisipasi masyarakat menekankan bahwa pelibatan aktif warga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi akan meningkatkan rasa kepemilikan, efektivitas program, dan keberlanjutan (S R Arnstein, 1969). Partisipasi yang ideal mencakup seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari identifikasi potensi, perencanaan pengembangan, implementasi kegiatan, hingga pemantauan dan evaluasi serta pemeliharaan. Dalam konteks pariwisata, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penyediaan layanan, promosi, pelestarian lingkungan, dan penjagaan keamanan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pengalaman wisatawan dan keberlanjutan ekosistem pariwisata (Yoeti, 2008).

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya beragam temuan mengenai tingkat dan bentuk partisipasi publik dalam pengelolaan pariwisata. (Novianty & al., 2025) melalui studi bibliometrik menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di destinasi lokal, mengindikasikan bahwa aspek partisipasi memiliki pengaruh positif terhadap keberlanjutan. Studi lain oleh (Setiawan, 2019) pada pengelolaan desa wisata di Jawa Tengah menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan cukup tinggi, namun cenderung menurun pada tahap implementasi dan pemeliharaan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan keterlibatan masyarakat di sepanjang siklus pengelolaan pariwisata.

Kesenjangan yang muncul adalah antara harapan teoritis mengenai partisipasi publik yang komprehensif di seluruh tahapan pengelolaan pariwisata, dengan realitas praktik yang seringkali terbatas pada tahapan awal. Fenomena di Pantai Lagunci, seperti yang diindikasikan dalam masalah penelitian, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat meliputi perencanaan, namun tidak secara memadai sampai pada tahap pemeliharaan dan keberlanjutan pariwisata. Keterbatasan ini dapat menghambat potensi maksimalisasi PAD dan peran pariwisata sebagai sarana hiburan warga, serta mengancam keberlanjutan jangka panjang destinasi tersebut (Agus & Riska, 2023). Kurangnya partisipasi dalam pemeliharaan dapat menyebabkan penurunan kualitas daya tarik wisata dan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk partisipasi publik dalam pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci, khususnya pada tahapan pemeliharaan dan keberlanjutan. Fokus penelitian akan diarahkan pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi pada tahapan akhir siklus pengelolaan dan bagaimana strategi partisipasi yang lebih efektif dapat dirancang untuk memastikan keberlanjutan pariwisata Pantai Lagunci. Pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Pantai Lagunci akan digunakan untuk menggali perspektif masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai partisipasi dalam pengelolaan pariwisata (J W Creswell & Clark, 2017).

Penelitian ini sangat penting untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Buton Selatan secara berkelanjutan dan partisipatif. Pemahaman yang mendalam mengenai dinamika partisipasi publik akan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengelolaan pariwisata yang inklusif dan efektif. Secara teoretis, temuan penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai partisipasi publik dalam administrasi publik, khususnya dalam konteks pengelolaan destinasi wisata daerah, serta memberikan kontribusi empiris terhadap teori partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan sumber daya publik (Ferdinand, 2014).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori partisipasi publik merujuk pada berbagai kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam pengelolaan sumber daya publik seperti pariwisata. Salah

satu fondasi teoritis yang kuat dalam studi partisipasi publik adalah Teori Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance Theory). Teori ini berkembang pesat pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, dipelopori oleh para sarjana administrasi publik dan ilmu politik yang mengamati pergeseran dari model pemerintahan hierarkis tradisional menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kemitraan (Ansell & Gash, 2008); (Emerson et al., 2012). Tata kelola kolaboratif menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan pembentukan kesepakatan bersama antara berbagai aktor (pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal) dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik.

Teori Tata Kelola Kolaboratif memiliki beberapa komponen utama yang saling terkait. (Emerson et al., 2012) mengidentifikasi tiga dimensi kunci: (1) Kepercayaan (Trust), yang menjadi fondasi bagi interaksi antar aktor; (2) Identitas Bersama (Shared Purpose), di mana para aktor mengembangkan pemahaman kolektif tentang tujuan yang ingin dicapai; dan (3) Proses Kolaboratif (Collaborative Process), yang mencakup dinamika partisipasi, dialog, negosiasi, dan pembentukan konsensus. Lebih lanjut, (Ansell & Gash, 2008) menyoroti bahwa tata kelola kolaboratif melibatkan elemen-elemen seperti dorongan insentif, sumber daya, struktur tata kelola, dan proses pemecahan masalah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Teori Tata Kelola Kolaboratif sangat relevan dalam konteks partisipasi publik dalam pengelolaan pariwisata, khususnya pada studi wisata Pantai Lagunci, Desa Bahari 3, Buton Selatan. Pengelolaan destinasi wisata secara efektif seringkali memerlukan kolaborasi antara pemerintah daerah sebagai regulator, pelaku usaha pariwisata (misalnya pengelola penginapan, pemandu wisata), masyarakat lokal yang tinggal di sekitar destinasi, dan wisatawan itu sendiri.

Dalam kasus wisata Pantai Lagunci, teori ini membantu menjelaskan fenomena bagaimana keterlibatan aktif masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan pengembangan destinasi. Sebagai contoh, jika masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pengembangan infrastruktur pariwisata, penetapan harga, atau pengelolaan dampak lingkungan, maka kemungkinan besar mereka akan merasa memiliki dan lebih berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian pantai. Kepercayaan yang dibangun melalui dialog terbuka antara pemerintah desa, pengelola objek wisata, dan warga akan menciptakan identitas bersama untuk menjadikan Pantai Lagunci sebagai destinasi unggulan yang berkelanjutan. Proses kolaboratif, seperti forum pertemuan rutin atau pembentukan kelompok kerja bersama, memungkinkan berbagai aspirasi dan kekhawatiran diakomodasi, sehingga kebijakan pengelolaan pariwisata yang dihasilkan lebih implementatif dan didukung oleh semua pihak (Emerson et al., 2012).

Implikasi teori ini terhadap penelitian di lapangan sangat signifikan. Ini menyarankan bahwa untuk memahami keberhasilan partisipasi publik dalam pengelolaan Pantai Lagunci, peneliti perlu menganalisis tingkat kepercayaan antar aktor, sejauh mana tujuan bersama telah terbentuk, dan efektivitas proses kolaboratif yang dijalankan. Lebih lanjut, teori ini memberikan panduan praktik bagi pemerintah daerah dan pengelola destinasi pariwisata dalam merancang strategi keterlibatan masyarakat yang lebih efektif, memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam fenomena partisipasi publik, (Moleong, 2016) dalam pengelolaan pariwisata di Objek Wisata Pantai Lagunci, Desa Bahari 3, Kabupaten Buton Selatan. Studi kasus dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual dan komprehensif sesuai dengan kondisi lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam sebagai sumber data utama (Moleong, 2016). Informan dipilih secara purposive (Creswell, 2007) penelitian meliputi masyarakat lokal (nelayan dan pedagang), pengelola wisata, aparat pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci. Data wawancara yang digunakan merupakan data primer yang telah tersedia dan dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik, (Moleong, 2016), yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara.

Tahapan analisis meliputi membaca transkrip wawancara secara berulang, melakukan pengkodean awal, mengelompokkan kode menjadi tema, serta menafsirkan tema-tema tersebut untuk menggambarkan bentuk, proses, dan tingkat partisipasi publik dalam pengelolaan pariwisata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai dinamika partisipasi publik dalam pengelolaan pariwisata di tingkat lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bahari 3 berpartisipasi dalam tahapan pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci, namun bentuk keterlibatan tersebut bersifat pasif, yakni hanya menyetujui usulan yang diajukan oleh pemerintah desa tanpa inisiatif aktif untuk memberi masukan strategis. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pengambilan keputusan seringkali rendah dan lebih bersifat simbolis (tokenism), di mana masyarakat hadir dalam forum tetapi keterlibatan mereka belum mencerminkan pengaruh nyata terhadap hasil Keputusan (Elim & Mba, 2021). Hal ini serupa dengan yang ditemukan bahwa keputusan strategis masih didominasi peran elite lokal sehingga masyarakat umum kurang berkontribusi secara substantif (Aulia, 2024).

Selanjutnya, dalam tahapan perencanaan, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Desa Bahari 3 terlibat aktif dengan memberikan ide dalam perencanaan pembangunan infrastruktur wisata seperti gerbang masuk dan miniatur perahu layar. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ini sejalan dengan prinsip partisipasi yang diidentifikasi dalam tinjauan literatur pariwisata berkelanjutan, yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan indikator awal keterlibatan aktif dalam pengembangan destinasi pariwisata yang inklusif (Wibowo & Belia, 2023). Riset pada objek wisata Pantai Minanga menunjukkan pula bahwa masyarakat terlibat dalam pemberian ide, tenaga, dan sumber daya dalam proses pembangunan, yang menunjang keberlanjutan pengembangan pariwisata lokal (Paludai et al., 2025).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bahari 3 menikmati hasil pengelolaan wisata melalui kontribusi pada kenyamanan pengunjung, pengamanan, seni budaya lokal, dan kuliner. Bentuk pemanfaatan hasil ini menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap destinasi dan manfaat ekonomi serta sosial yang muncul dari pariwisata. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan pemanfaatan hasil seringkali tampak melalui keterlibatan masyarakat dalam layanan wisata dan kegiatan budaya yang menghasilkan manfaat langsung bagi mereka (Ismanto et al., 2023). Keikutsertaan masyarakat dalam pariwisata tidak hanya meningkatkan rasa memiliki tetapi juga berkontribusi langsung pada pemberdayaan ekonomi lokal (Cahyaningrum et al., 2024).

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa evaluasi pengelolaan Pantai Lagunci belum melibatkan masyarakat secara resmi, di mana evaluasi dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa partisipasi komunitas. Temuan ini memperlihatkan kesenjangan dalam proses partisipasi yang seharusnya bersifat menyeluruh, termasuk pada tahapan evaluasi. Temuan serupa juga muncul dalam studi pengembangan Pantai Pulisan, di mana meskipun masyarakat berperan dalam perencanaan dan implementasi, evaluasi bersama antara pemerintah dan masyarakat belum pernah dilaksanakan (Patadungan et al., 2021). Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam evaluasi juga dapat menghambat kemampuan komunitas untuk menyuarakan feedback dan rekomendasi perbaikan, sehingga berpotensi menurunkan rasa memiliki dan keberlanjutan program pariwisata itu sendiri (Aulia, 2024).

Selain menggambarkan tahapan partisipasi masyarakat, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola partisipasi yang terjadi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan konsep partisipasi masyarakat yang ideal dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Kondisi ini sejalan dengan teori *ladder of participation* yang dikemukakan oleh Arnstein, di mana partisipasi masyarakat Desa Bahari 3 masih berada pada tingkat konsultasi dan tokenisme, belum mencapai tingkat kemitraan atau kontrol masyarakat (Sherry R Arnstein, 2019). Penelitian terkini di kawasan wisata pesisir Indonesia juga menunjukkan bahwa dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan menyebabkan keterlibatan masyarakat cenderung formalitas dan belum bersifat substantif (Sari & Nugroho, 2022).

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat yang relatif aktif pada tahap perencanaan dan pemanfaatan hasil menunjukkan adanya modal sosial lokal yang cukup kuat. Keterlibatan

masyarakat dalam kegiatan seni budaya, kuliner lokal, dan menjaga kenyamanan wisatawan menandakan bahwa pariwisata telah dipersepsikan sebagai peluang ekonomi dan sarana pelestarian budaya. Temuan ini mendukung hasil penelitian (Ismanto et al., 2023) yang menyatakan bahwa ketika masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pariwisata, maka tingkat keterlibatan dan rasa memiliki terhadap destinasi akan meningkat. Hal serupa juga ditemukan oleh (Putri & Pratama, 2023) yang menegaskan bahwa manfaat ekonomi dan sosial merupakan faktor utama pendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

Namun demikian, ketiadaan pelibatan masyarakat dalam evaluasi pengelolaan pariwisata menjadi kelemahan utama dalam pengelolaan Pantai Lagunci. Evaluasi yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah berpotensi mengabaikan pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa evaluasi partisipatif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program pariwisata dan mencegah konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat (Putra et al., 2020). Tanpa mekanisme evaluasi bersama, kebijakan pariwisata cenderung tidak adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan setempat (Litman, 2024) dalam (Rifdah & Kusdiwanggo, 2024).

Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi merupakan prasyarat utama tercapainya keberlanjutan sosial dan ekonomi. Penelitian di kawasan wisata pesisir Sulawesi menunjukkan bahwa destinasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam evaluasi memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan destinasi yang bersifat top-down (Ruppayoon & Leekpai, 2023). Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan pembukaan ruang evaluasi partisipatif perlu menjadi agenda utama pemerintah desa dalam pengelolaan Pantai Lagunci.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bahari 3 telah berlangsung, namun belum optimal dan belum merata pada setiap tahapan pengelolaan pariwisata. Temuan ini memperkaya kajian pariwisata berbasis masyarakat dengan menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam aktivitas fisik dan ekonomi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, pengelolaan Pantai Lagunci perlu diarahkan pada model kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sejajar pemerintah dalam seluruh proses pengelolaan pariwisata.

Partisipasi masyarakat Desa Bahari 3 yang masih dominan pada tahap implementasi dan pemanfaatan hasil menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci belum sepenuhnya menerapkan prinsip *community-based tourism* (CBT) secara komprehensif. Dalam konsep CBT, masyarakat seharusnya tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan wisata, tetapi juga sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan dan evaluasi program (Goodwin & Santilli, 2019). Temuan penelitian ini menguatkan hasil studi di beberapa destinasi wisata pesisir Indonesia yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat seringkali berhenti pada aspek teknis-operasional, sementara kendali strategis tetap berada pada pemerintah (Rahmawati & Sunaryo, 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa yang bersifat pasif juga mengindikasikan bahwa mekanisme partisipasi formal belum menjamin keterlibatan substantif. Kehadiran masyarakat dalam rapat tidak selalu diikuti dengan kemampuan atau ruang untuk memengaruhi keputusan akhir. Penelitian oleh (Tosun & Timothy, 2020) menegaskan bahwa dalam banyak konteks pariwisata berkembang, partisipasi masyarakat terhambat oleh keterbatasan informasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta budaya birokrasi yang masih top-down. Kondisi ini tampak relevan dengan temuan di Pantai Lagunci, di mana masyarakat cenderung menyetujui keputusan yang telah dirancang oleh pemerintah desa.

Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat dalam penyediaan kuliner lokal, kegiatan seni budaya, serta penjagaan keamanan kawasan wisata menunjukkan adanya partisipasi berbasis ekonomi dan budaya. Bentuk partisipasi ini mencerminkan strategi adaptif masyarakat dalam memanfaatkan peluang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan. Penelitian oleh (Suansri et al., 2021) menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasakan manfaat ekonomi secara langsung, maka dukungan terhadap pengembangan pariwisata cenderung meningkat, meskipun keterlibatan dalam aspek pengambilan keputusan masih terbatas. Hal ini juga ditemukan pada desa-desa wisata pesisir di Nusa Tenggara dan Maluku, di mana masyarakat berperan aktif dalam layanan wisata, namun minim dalam perencanaan strategis (Lestari et al., 2022).

Tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses evaluasi pengelolaan Pantai Lagunci mencerminkan lemahnya penerapan prinsip governance partisipatif. Evaluasi yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman masyarakat lokal. Menurut penelitian (Nurhadi & Kurniawan, 2020), evaluasi partisipatif merupakan elemen penting dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan karena memungkinkan adanya pembelajaran bersama dan perbaikan berkelanjutan. Tanpa evaluasi yang inklusif, keberlanjutan sosial pariwisata akan sulit dicapai.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Pantai Lagunci masih dipengaruhi oleh ketergantungan struktural terhadap pemerintah desa. Masyarakat belum sepenuhnya memiliki kemandirian dalam menginisiasi program atau mengawasi kebijakan pariwisata. Penelitian oleh (Dangi & Jamal, 2016), yang masih relevan dalam dekade terakhir, menyebutkan bahwa keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat sangat bergantung pada distribusi kekuasaan yang seimbang antara pemerintah dan komunitas lokal. Ketidakseimbangan ini berisiko menjadikan masyarakat sekadar objek pembangunan pariwisata.

Penelitian ini memperkaya kajian empiris pariwisata lokal dengan menunjukkan bahwa kehadiran partisipasi masyarakat tidak selalu identik dengan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi yang bersifat pasif dan tidak menyentuh aspek evaluasi serta pengambilan keputusan strategis berpotensi membatasi kontribusi masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan Pantai Lagunci memerlukan transformasi menuju model kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan pariwisata, bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan wisata.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi tidak terlepas dari keterbatasan kapasitas dan literasi kebijakan pariwisata di tingkat lokal. Masyarakat cenderung belum memiliki pemahaman yang memadai terkait hak, peran, dan tanggung jawab mereka dalam tata kelola pariwisata. Penelitian oleh (Cole, 2018) menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas masyarakat lokal sering menjadi faktor penghambat utama dalam partisipasi yang bermakna, terutama di destinasi wisata berkembang. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih mengikuti arahan pemerintah dibandingkan terlibat aktif dalam proses deliberatif.

Selain faktor kapasitas, struktur kelembagaan pengelolaan pariwisata di tingkat desa juga berpengaruh terhadap kualitas partisipasi masyarakat. Tidak adanya lembaga khusus atau kelompok sadar wisata yang berfungsi sebagai wadah representasi masyarakat dapat membatasi ruang aspirasi komunitas. Penelitian oleh (Biedenweg et al., 2020) menegaskan bahwa kelembagaan lokal yang kuat berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks Pantai Lagunci, ketiadaan mekanisme kelembagaan yang inklusif berpotensi menyebabkan partisipasi masyarakat bersifat individual dan tidak terorganisir secara sistematis.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat yang terkonsentrasi pada aspek ekonomi dan budaya juga mencerminkan orientasi pariwisata yang masih berbasis manfaat jangka pendek. Masyarakat terlibat aktif selama aktivitas tersebut memberikan keuntungan langsung, seperti penjualan kuliner atau pertunjukan seni. Penelitian oleh (Scheyvens & Biddulph, 2018) menunjukkan bahwa partisipasi berbasis manfaat ekonomi tanpa diiringi keterlibatan dalam pengambilan keputusan berisiko menciptakan ketergantungan dan melemahkan posisi tawar masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan partisipasi struktural menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat pariwisata.

Ketiadaan evaluasi partisipatif juga berimplikasi pada terbatasnya mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pariwisata. Padahal, evaluasi yang melibatkan masyarakat memungkinkan identifikasi masalah secara dini dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Penelitian oleh (Bennett et al., 2019) dalam konteks pariwisata pesisir menegaskan bahwa evaluasi berbasis komunitas meningkatkan efektivitas pengelolaan dan memperkuat legitimasi kebijakan. Tanpa keterlibatan masyarakat, evaluasi cenderung bersifat administratif dan kurang merefleksikan realitas di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pantai Lagunci memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui keterlibatan fisik dan ekonomi, tetapi juga melalui pemberdayaan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan transparansi proses pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Stone & Stone, 2021) yang menekankan bahwa keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan komunitas untuk berperan sebagai aktor strategis, bukan sekadar pelaksana program.

Secara keseluruhan, lanjutan pembahasan ini mempertegas bahwa partisipasi masyarakat di Desa Bahari 3 masih berada dalam tahap berkembang dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih inklusif. Penelitian ini berkontribusi pada literatur pariwisata dengan menunjukkan bahwa tantangan utama pengelolaan pariwisata lokal bukan pada absennya partisipasi, melainkan pada kualitas dan kedalaman partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus pengelolaan destinasi.

Aspek lain yang penting untuk didiskusikan adalah hubungan antara partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan pariwisata di Pantai Lagunci. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah berperan dalam menjaga kenyamanan, keamanan, dan aktivitas budaya, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka keberlanjutan jangka panjang. Penelitian oleh (Organization, 2018) menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata hanya dapat tercapai apabila masyarakat lokal dilibatkan secara aktif dan setara dalam seluruh tahapan pengelolaan, termasuk pengambilan keputusan dan evaluasi. Ketidakseimbangan partisipasi berpotensi menjadikan pengelolaan pariwisata bersifat reaktif dan kurang adaptif terhadap perubahan sosial maupun lingkungan.

Selain itu, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam evaluasi juga dapat berdampak pada pengelolaan lingkungan pesisir. Pantai sebagai kawasan wisata memiliki kerentanan tinggi terhadap degradasi lingkungan apabila tidak dikelola secara kolaboratif. Penelitian oleh (Lee & Jan, 2019) menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam evaluasi pengelolaan wisata pesisir berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan konservasi. Dalam konteks Pantai Lagunci, absennya evaluasi partisipatif berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat yang masih bersifat pasif dalam pengambilan keputusan juga berkaitan dengan pola kepemimpinan lokal. Kepemimpinan yang cenderung sentralistik dapat membatasi ruang dialog dan inisiatif masyarakat. Penelitian oleh (Aref, 2019) menegaskan bahwa kepemimpinan partisipatif di tingkat lokal memiliki peran kunci dalam mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dan kritis dalam pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan pemerintah desa menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat di Desa Bahari 3.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya dan kuliner lokal menunjukkan adanya potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Partisipasi ini dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat apabila difasilitasi dengan kebijakan yang tepat. Penelitian oleh (Richards, 2020) menyatakan bahwa integrasi ekonomi kreatif dan pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas lokal destinasi. Namun demikian, tanpa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan strategis, potensi ekonomi kreatif tersebut berisiko tidak berkembang secara optimal.

Dengan demikian, lanjutan pembahasan ini menegaskan bahwa tantangan utama pengelolaan Pantai Lagunci bukan terletak pada rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi, melainkan pada terbatasnya ruang, kapasitas, dan mekanisme partisipasi yang disediakan. Penelitian oleh (Mensah & Ernest, 2020) menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan ruang yang jelas dan kapasitas yang memadai, tingkat partisipasi dan dukungan terhadap pariwisata akan meningkat secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat di Pantai Lagunci memerlukan reformulasi pendekatan pengelolaan yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Secara keseluruhan, bagian pembahasan ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci masih memerlukan transformasi tata kelola menuju model partisipatif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak cukup hanya diukur dari keterlibatan fisik dan ekonomi, tetapi harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki peran strategis dan kontrol sosial dalam pengelolaan destinasi wisata.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Bahari 3 dalam pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci telah berjalan, namun belum optimal. Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan pariwisata, terutama pada kegiatan operasional, ekonomi, dan pelestarian budaya lokal. Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih bersifat pasif, dan masyarakat belum dilibatkan secara resmi dalam proses evaluasi pengelolaan

pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pantai Lagunci masih didominasi oleh peran pemerintah desa dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas partisipasi masyarakat melalui pembukaan ruang dialog yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan dan evaluasi pengelolaan pariwisata. Pemerintah desa disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam forum evaluasi, membentuk atau menguatkan kelembagaan pengelola pariwisata yang melibatkan unsur masyarakat, serta meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan pariwisata Pantai Lagunci yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, I. K., & Riska, L. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 8(2), 115–128.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aref, F. (2019). Community participation for sustainable tourism development. *Journal of Tourism Planning & Development*, 16(3), 308–320.
- Arnstein, S R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Arnstein, Sherry R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24–34. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>
- Aulia, W. J. H. R. & S. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuluh Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang. *WPAJ*, 6(1), 34–46.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan. (2023). *Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Buton Selatan.
- Bennett, N. J., Di Franco, A., & Calo, A. (2019). Community-based monitoring and evaluation in coastal tourism. *Marine Policy*, 104, 12–22.
- Biedenweg, K., Scott, R. P., & Scott, T. A. (2020). How does engaging stakeholders in natural resource governance influence outcomes? *Society & Natural Resources*, 33(6).
- Cahyaningrum, D., Hasani, T. D., Wayan, N., Mutiara, A., & Safitri, D. (2024). The Role of Community Participation Toward Economic Empowerment in the Tourism Sector. *West Science Business and Management*, 2(04), 1150–1158.
- Cole, S. (2018). *Tourism, Culture and Development: Hopes, Dreams and Realities*. CABI.
- Creswell, J W, & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications.
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry* (Second). Sage Publications.
- Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). An integrated approach to sustainable community-based tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(10), 1403–1420.
- Elim, Y. V., & Mba, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Pariwisata Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019. *Jurnal Destinasi Pariwisata; Vol 9 No 1 (2021): VOL 9, NO 1 (2021):doi.10.24843/JDEPAR.2021.V09.I01.P03* . <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/view/74898>
- Emerson, K., Nabatchi, S., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for understanding collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–28.
- Ferdinand, A. T. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Studi Kasus*. BP Universitas Diponegoro.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2019). *Community-based tourism: A success?* International Centre for Responsible Tourism.
- Ismanto, S. U., Indira, D., & Santoso, M. B. (2023). *Community Involvement Based on Community-Based Tourism Principles in the Development of Area-Based Tourism in Cirebon*

Regency. 06(02).

- Lee, T. H., & Jan, F. H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents' perceptions of environmental conservation. *Tourism Management*, 70, 368–380.
- Lestari, P., Yusuf, M., & Rahman, A. (2022). Community participation in coastal tourism villages of Eastern Indonesia. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 6(1), 55–68.
- Mensah, I., & Ernest, E. (2020). Community participation in sustainable tourism development: A case study of local communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(3), 482–498.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (revisi ke). Remaja rosda karya.
- Novianty, E., & al., et. (2025). *The Influence of Community Participation in Sustainable Tourism Management at Local Destinations: A Bibliometric Study (2020–2025)*.
- Nurhadi, & Kurniawan, B. (2020). Evaluasi partisipatif dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(2), 101–114.
- Organization, W. T. (2018). *Tourism and community development*. UNWTO.
- Paludai, M. S., Hatu, R. A., Latore, S., & Bumulo, S. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2 SE-Artikel Penelitian), 63–74. <https://doi.org/10.37905/sjppm.v2i2.220>
- Patadungan, E., Tasik, F. C., & Purwanto, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Pulisan di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Agrisioekonomi*, 17(3), 589–600. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/55200>
- Putri, R. A., & Pratama, A. R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata berbasis pemberdayaan ekonomi lokal. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 7(1), 45–58. <https://journal.ugm.ac.id/jpt/article/view/86542>
- Rahmawati, Y., & Sunaryo, B. (2021). Community participation in local tourism planning. *Journal of Regional Development*, 17(3), 211–225.
- Richards, G. (2020). Creative tourism: Opportunities for local communities. *Annals of Tourism Research*, 82, 102919.
- Rifdah, B. N., & Kusdiwanggo, S. (2024). Factors Influencing Community Participation in the Development of Tourism Areas in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 13(2), 75–88. <https://iplbijournals.id/index.php/jlbi/article/view/358>
- Ruppayoon, S., & Leekpai, P. (2023). Community participation and sustainability outcomes in coastal tourism management. *Ocean and Coastal Management*, 236, 106522.
- Sari, R. P., & Nugroho, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pesisir: Tantangan dan praktik tata kelola lokal. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 6(2), 123–135. <https://journal.ugm.ac.id/jpt/article/view/78145>
- Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589–609.
- Setiawan, B. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 5(1), 45–58.
- Stone, M. T., & Stone, L. S. (2021). *Community-Based Tourism: Critical Perspectives*. CABI.
- Suansri, P., Richards, G., & Chin, C. (2021). Community-based tourism and local economic benefits: Implications for community support and participation. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(6), 912–928.
- Tosun, C., & Timothy, D. J. (2020). Community participation in tourism development: Issues and challenges. *Tourism Review*, 75(1), 18–32.
- Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 25–32.
- Yoeti, O. A. (2008). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Pustaka Warga Jakarta.